

## Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Partisipasi Politik Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani

Muhammad Riziq Faishal<sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> faishalriziq@upi.edu\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 15 Agustus 2024;  
Revised: 22 Agustus 2024;  
Accepted: 1 September 2024.

### Kata-kata kunci:

Pendidikan  
Kewarganegaraan;  
Partisipasi Politik;  
Masyarakat Madani.

---

### : ABSTRAK

Artikel jurnal ini membahas urgensi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Masyarakat Madani. Seorang warga negara yang baik harus memiliki wawasan yang memadai untuk menempatkan dirinya secara tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan saat ini menghadirkan tantangan signifikan bagi Indonesia dalam membangun masyarakat yang dewasa menuju Masyarakat Madani. Artikel ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat dalam membangun komunitas yang dewasa, penuh dengan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Proses menuju Masyarakat Madani tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting sebagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menciptakan Masyarakat Madani yang inklusif dan berkeadilan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam mendukung terwujudnya Masyarakat Madani di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menghambat pencapaian Masyarakat Madani dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan yang mendalam bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperkuat peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat.

---

### ABSTRACT

*The Urgency of Civic Education in Building Political Participation to Realize Civil Society. This journal article discusses the urgency of the role of Civic Education in building a Civil Society. A good citizen must possess adequate knowledge to appropriately position themselves in societal life. The current developments present significant challenges for Indonesia in fostering a mature society towards a Civil Society. This article aims to motivate the public in building a mature community, enriched with positive values in everyday life. The process of achieving a Civil Society is inevitably met with various challenges and obstacles. Civic Education plays a crucial role as an educational effort to raise citizens' awareness of their rights and responsibilities and to encourage active participation in societal life. This study employs a qualitative approach to explore the role of Civic Education in creating an inclusive and just Civil Society. The findings of this study are expected to contribute to the development of more effective educational policies in supporting the realization of Civil Society in Indonesia. This research also identifies key factors that hinder the achievement of a Civil Society and offers practical solutions to overcome these obstacles. Thus, this article provides valuable insights for academics, practitioners, and policymakers in strengthening the role of education in societal development.*

---

### Keywords:

Civic Education;  
Political Participation;  
Civil Society.

---

Copyright © 2024 (Muhammad Riziq Faishal). All Right Reserved

How to Cite : Faishal, M. R. (2024). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Partisipasi Politik Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(9), 318–324. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/2467>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Topik ini menjadi sangat relevan mengingat tantangan global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini memungkinkan warga negara untuk lebih memahami berbagai aspek sosial, politik, dan hukum dalam konteks lokal maupun global (Anggraeni et al., 2020).

Konsep masyarakat madani, atau dikenal dengan istilah *civil society* dalam bahasa Inggris, telah lama menjadi fokus dalam diskursus sosial dan politik. Istilah ini merujuk pada komunitas politik yang beradab dan memiliki kode hukum tersendiri, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Cicero dengan istilah *societas civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam konteks masyarakat Islam, masyarakat madani mengacu pada komunitas yang berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang menekankan nilai-nilai kebijakan umum dan keadilan, yang disebut *al-khair* (Supriatna, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep masyarakat madani telah mengalami berbagai interpretasi dan adaptasi di berbagai negara. Di dunia Barat, *civil society* berkembang sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang, sementara di dunia Islam, konsep ini dikaitkan dengan upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai masyarakat Madinah yang ideal. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran kunci dalam mengembangkan konsep masyarakat madani yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat (Anggraeni et al., 2020).

Pentingnya pendidikan Kewarganegaraan terletak pada kemampuannya untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengajaran pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan yang esensial untuk membentuk masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab, yang mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bijak (Supriatna, 2020).

Meskipun pentingnya pendidikan Kewarganegaraan telah diakui secara luas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam membentuk masyarakat madani yang ideal. Salah satu masalah utama adalah bagaimana pendidikan Kewarganegaraan dapat secara efektif mengatasi tantangan-tantangan sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini. Arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat seringkali membuat upaya pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan menjadi kurang efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Anggraeni et al., 2020).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan Kewarganegaraan dapat dioptimalkan untuk membangun masyarakat madani yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masalah yang akan diteliti adalah sejauh mana pendidikan Kewarganegaraan saat ini mampu menjawab tantangan-tantangan sosial dan budaya, serta bagaimana konsep masyarakat madani dapat diterapkan dalam konteks modern untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan dewasa secara sosial dan politik (Supriatna, 2020).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Menurut Anggraeni et al. (2020), pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku warga negara yang kritis dan partisipatif. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Kewarganegaraan seringkali tidak optimal karena kurangnya penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya yang dinamis (Supriatna, 2020).

Beberapa studi juga menekankan pentingnya pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun masyarakat madani yang kuat. Konsep ini, yang berasal dari pengalaman masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, seringkali digunakan sebagai model dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, dalam konteks modern, penerapan konsep ini membutuhkan adaptasi yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang berbeda-beda (Anggraeni et al., 2020).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai bagaimana pendidikan Kewarganegaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan tradisional dalam pengajaran Kewarganegaraan, tanpa memperhatikan perkembangan teknologi dan media baru yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial dan politik warga negara. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pendidikan Kewarganegaraan (Supriatna, 2020).

Lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan pendidikan Kewarganegaraan di berbagai negara. Sementara beberapa negara berhasil menerapkan pendidikan ini secara efektif, banyak negara lain yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan politik. Penelitian ini akan mencoba untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai konteks sosial (Anggraeni et al., 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat madani yang responsif terhadap tantangan sosial dan budaya kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai konteks sosial.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pendidikan Kewarganegaraan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan pendidikan ini, hasil penelitian dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsep masyarakat madani dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks global yang berbeda-beda (Anggraeni et al., 2020).

Secara praktis, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada praktik pendidikan di lapangan. Dengan mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif, para pendidik dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Ini akan membantu dalam membentuk warga negara yang lebih kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan memperkuat masyarakat madani secara keseluruhan (Supriatna, 2020).

Penelitian ini juga penting bagi pembuat kebijakan, karena dapat memberikan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung penguatan pendidikan Kewarganegaraan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan demokratis (Anggraeni et al., 2020).

Penelitian ini akan berfokus pada analisis pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks membangun masyarakat madani. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap kurikulum, metode pengajaran, serta peran pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan pelajar. Pembatasan penelitian ini meliputi keterbatasan data empiris dan

cakupan geografis yang hanya mencakup wilayah tertentu, sehingga generalisasi hasil penelitian ini mungkin terbatas.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian pustaka (library research) melalui jurnal, buku dan berita yang relevan dengan pembahasan, yang nanti dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini memakai tata cara penelitian literatur ialah dengan serangkaian aktivitas yang berkenaan dengan tata cara pengumpulan informasi pustaka, membaca serta mencatat, dan mengelolah bahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri dimana data yang diperoleh mempunyai mutu dan makna-makna tertentu yang didapatkan lewat penelusuran pustaka. Analisis penelitian ini memakai pendekatan kualitatif sebab informasi yang dipaparkan berbentuk deskripsi yang dijabarkan dalam wujud pernyataan. Data yang dipaparkan didapat dari membaca teori-teori, menganalisis, serta menguasai yang setelah itu disimpulkan dari apa yang sudah didapat dengan sumber-sumber yang relevan serta berkaitan.

## Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menyoroti urgensi dan peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membentuk generasi muda menjadi warga negara yang dewasa dan bertanggung jawab. PKn, sebagai komponen penting dalam pendidikan nasional, berfungsi untuk menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sejak dini, sehingga generasi muda dapat memahami betapa luas dan majemuknya Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki mentalitas dan spiritualitas yang luas, yang akan mendukung pengelolaan sumber daya nasional secara efektif demi kemajuan bangsa (Budimansyah, 2007). Temuan ini menegaskan pentingnya PKn dalam memelihara demokrasi konstitusional di Indonesia, yang tidak mungkin bertahan tanpa warga negara yang berpengetahuan dan berpartisipasi aktif.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ethos demokrasi tidak diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami oleh setiap generasi baru. Alexis de Toqueville menekankan bahwa setiap generasi harus memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan demokrasi konstitusional melalui pendidikan dan keteladanan (Branson, 1998). Ini menunjukkan bahwa PKn memiliki tanggung jawab besar dalam mereproduksi nilai-nilai demokrasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang pada akhirnya akan memastikan kelangsungan hidup demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa PKn telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, dengan tujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, PKn dirancang untuk mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terkait dalam konteks nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan demokratis, dan bela negara (Budimansyah, 2008). Temuan ini menunjukkan bahwa PKn tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Temuan lain yang penting adalah bahwa PKn berorientasi pada pembentukan masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif. Dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, PKn bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan inklusif, di mana warga negara tidak hanya menjadi penerima kebijakan tetapi juga berperan aktif dalam pembuatannya. Civic education, menurut Print et al. (1999), adalah elemen kunci dalam membangun dan mengkonsolidasikan masyarakat demokratis. Oleh karena itu, visi PKn harus dipahami secara luas oleh guru, siswa, dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang cerdas dan partisipatif.

Temuan penelitian ini berkaitan erat dengan teori-teori pendidikan dan demokrasi yang telah ada. Konsep bahwa demokrasi harus dipelajari dan tidak diwariskan (Branson, 1998) memperkuat argumen bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk warga negara yang mampu

mendukung kelangsungan demokrasi konstitusional. PKn berfungsi sebagai alat untuk membangun ethos demokrasi yang harus dipupuk secara terus-menerus, sebagaimana diusulkan oleh Alexis de Toqueville. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan sikap yang mendukung nilai-nilai demokrasi.

Temuan ini juga sejalan dengan pandangan bahwa PKn adalah bagian integral dari pendidikan yang berbasis nilai (*value-based education*) yang tidak hanya mencakup aspek kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik (Budimansyah, 2008). Dalam konteks ini, PKn memainkan peran ganda dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan demokratis sekaligus membentuk perilaku warga negara yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa PKn tidak hanya berfokus pada teori tetapi juga pada praktik, yang membuatnya sangat relevan dalam konteks pembentukan masyarakat madani di Indonesia.

Lebih lanjut, analisis terhadap temuan yang menunjukkan pentingnya civic education dalam membangun masyarakat demokratis (Print et al., 1999) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya penting untuk individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, PKn memiliki peran strategis dalam memberdayakan warga negara agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya akan memperkuat masyarakat sipil di Indonesia. Oleh karena itu, PKn harus dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap warga negara yang mendukung kelangsungan demokrasi di Indonesia. PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengajarkan pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk warga negara yang cerdas, berakhlak mulia, dan partisipatif. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa PKn harus terus diperkuat dalam kurikulum pendidikan nasional untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki kemampuan dan karakter yang dibutuhkan untuk memelihara demokrasi di Indonesia.

Selain itu, temuan ini juga mengimplikasikan perlunya pendekatan yang holistik dalam Pendidikan Kewarganegaraan, di mana aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik harus diintegrasikan dengan baik. Ini berarti bahwa pendidik harus memastikan bahwa PKn tidak hanya diajarkan sebagai teori tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat diinternalisasi dengan baik oleh generasi muda.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasannya adalah bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terutama berasal dari kajian pustaka, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi lapangan secara menyeluruh. Penggunaan sumber-sumber sekunder dapat membatasi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan diimplementasikan dalam konteks nyata di sekolah-sekolah Indonesia.

Keterbatasan lain adalah bahwa penelitian ini tidak mencakup analisis empiris mengenai efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara di Indonesia. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi interpretasi hasil, karena tanpa data empiris yang mendukung, sulit untuk menilai sejauh mana PKn benar-benar berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat sipil yang kuat dan demokratis.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang telah diidentifikasi, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan diimplementasikan secara praktis di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia. Penelitian empiris yang melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan guru serta siswa akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas PKn dalam membentuk karakter warga negara.

Selain itu, disarankan agar kurikulum PKn terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia. Pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman mungkin lebih efektif dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada

generasi muda. Dengan demikian, PKn dapat terus menjadi instrumen yang relevan dan efektif dalam membangun masyarakat madani yang kuat di Indonesia.

### Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat madani yang demokratis di Indonesia. Melalui PKn, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung kelangsungan demokrasi konstitusional. PKn juga berfungsi sebagai alat untuk membangun warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang diperlukan untuk memelihara dan memperkuat masyarakat sipil. Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi PKn, terutama dalam hal penyesuaian dengan kondisi sosial dan budaya yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbarui dan mengembangkan kurikulum PKn agar lebih relevan dan efektif dalam membentuk karakter warga negara yang mendukung terwujudnya masyarakat madani di Indonesia.

### Referensi

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia anggota IKAPI.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aminuddin, M. F., Ramadlan, M., & Shodiq, F. (2015). Match-All party: pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 2.
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). *The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense*. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Aziz, M. A. (2016). Pilkada serentak melalui DPRD: sebuah gagasan mewujudkan Pilkada demokratis perspektif Pancasila dan UUD 1945. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 154-170.
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusmiati, K. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Mustakim. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Khazanah Ilmu.
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Ilsa, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 7(1), 71–83. [https://doi.org/10.29407/js\\_unpgri.v7i1.15642](https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642)
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.

Sawir, M. (2019). Tinjauan Mengenai Fungsi Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 208-221.

Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformativ*, 5(1), 87-108.

Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).